

# KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI TINDAKAN PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA

Oleh:

**DODI SAPUTRA**

e-mai: [do2d27@yahoo.com](mailto:do2d27@yahoo.com)

Pembimbing : AFRIZAL, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This research is motivated by the intercepts made by Australia against the president, first lady, and other Indonesian official. This research aims to describe the strategic partnership and the ups and downs of diplomatic relations between the two countries, and to explain the intercept made by Australia against Indonesia then to explain the Indonesian Government's policy against the intercepts case,*

*This research uses qualitative research methods. Research conducted by way of explaining based on existing data. Then techniques used in this research libraries from various sources such as books, journals, newspapers and also the documentation is accessible from the internet. The theory used in this research is the theory of the rational actor models of decision making and the concept of foreign policy. In this model Graham T. Allison mentioned that in decision making abroad is described as a process of intellectual selection based on top of existing alternatives.*

*This result in the research was the government's policy towards Indonesia by intercept actions Australia is recalled its ambassador from Australia, stopping a number of cooperation with Australia, and for the continuation of cooperation between government of Indonesia and Australia drew up a code of conduct.*

**Keywords : Policy, Decision Making, intercepts, Diplomatic Relations**

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang penting bagi Australia. Begitu juga Indonesia. Situasi demikian membuat kedua negara harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat, yang dapat menjamin kesetabilan hubungan kedua negara dalam interaksi politik internasional. Namun dalam perkembangannya, hubungan tersebut

diwarnai oleh nuansa-nuansa yang memperburuk hubungan tersebut dari waktu ke waktu. Mulai dari persoalan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, persoalan Timur-Timur, persoalan separatisme Papua, dan permasalahan-permasalahan lainnya antara kedua negara yang dipenuhi tarik ulur konflik. Namun, selama itu, kedua negara masih mampu dalam memecahkan

permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun, adanya penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, menambah deretan panjang kusutnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden, Ibu negara, dan sejumlah menteri oleh intelijen Australia membuat hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami ketegangan. Hal ini sesuai dengan Informasi rahasia yang dibocorkan mantan konsultan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat (AS) Edward Snowden bahwa terdapat 90 negara termasuk Indonesia yang disadap oleh badan intelijen AS dan Australia. Menurut dokumen tersebut, penyadapan yang dilakukan oleh Defence Signal Directorate (DSD), yang merupakan bagian dari dinas Intelijen Australia menyadap Presiden Indonesia sebanyak 15 kali pada bulan Agustus tahun 2009. Penyadapan juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini sungguh sangat memprihatinkan karena Australia tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia. Apalagi kedua negara bersahabat dan menjalin hubungan diplomatik. Sikap Pemerintah Australia ini menunjukkan bukti bahwa Australia bukanlah partner dan tetangga yang baik, tetapi Australia adalah wakilnya polisi dunia Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Sebenarnya, Hampir 10 tahun yang lalu, sebuah peringatan keras disampaikan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang menjabat saat itu yaitu Jenderal Ryamizard Ryacudu bahwa ada sekitar 60 ribu intel asing di Indonesia. Menurutnya, mereka menggunakan beragam profesi seperti wartawan, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>2</sup> Namun peringatan ini, belum mendapat respon berarti terhadap pembenahan keamanan rahasia negara. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) Mahfudz Siddiq menilai penyadapan ini dilakukan lewat satelit karena selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan.<sup>3</sup> Tindakan penyadapan oleh Australia ini Menjadi urgen bagi Indonesia untuk menata kembali keamanan sistem komunikasi dan informasi kenegaraannya, khususnya sistem komunikasi dan informasi pertahanan dan keamanan. Termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol Indonesia sendiri. Dari kasus penyadapan itu Indonesia harus mengoptimalkan peran lembaga sandi negara dalam menangkal berbagai kegiatan yang patut diduga berupa penyadapan.

Lembaga sandi negara (Lemaneg) mempunyai sejumlah tugas pokok, diantaranya adalah memiliki tugas mengamankan informasi rahasia negara, lembaga sandi negara juga memiliki tugas lain, yaitu memperoleh informasi melalui analisis informasi rahasia pihak asing. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan intelijen sinyal. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia sebenarnya tidak perlu dilakukan karena persahabatan tumbuh berdasarkan sikap saling percaya dan diplomasi yang berjalan baik.<sup>4</sup>

Warga Negara Indonesia mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera memutus hubungan kerjasama dengan Australia. Sebab jika hal itu dilakukan, Australia akan rugi besar, mengingat negeri Kangguru itu sangat tergantung kepada Indonesia. Pertama menyangkut terorisme, Indonesia lebih ahli dibanding Australia, dikarenakan Australia sangat butuh informasi tentang terorisme dari Indonesia. sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu anggota Komisi III DPR-RI Eva Kusuma Sundari. Kedua, soal *people boat* atau *imigrant*. Indonesia selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang

---

<sup>1</sup>Austarlia Spied On President Leaked Documents Reveal, <http://www.abc.net.au>, diakses pada tanggal 17 Januari 2014

<sup>2</sup>KSAD, 60 ribu Intelijen Asing berkeliaran di Indonesia, Tempo, edisi 5 Desember 2003

---

<sup>3</sup>Upaya Indonesia Mengatasi Penyadapan, <http://www.antarasumut.com>, diakses tanggal 14 Januari 2014

<sup>4</sup>Pemerintah masih konfirmasi kabar penyadapan Presiden, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 14 Januari 2014

*imigrant*. Ketiga adalah, dari segi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tergantung dari Australia, namun investor terbesar Indonesia sampai saat ini adalah Jepang, Amerika Serikat, dan China. Indonesia juga bisa stop impor daging Australia dan beralih ke India. Hal ini dapat memungkinkan menggenjot produksi daging dalam negeri. Secara realitas, Indonesia tidak begitu tergantung terhadap Australia, malah sebaliknya. Ini soal keseriusan pemerintah untuk menegakkan marwah RI.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, selain pihak yang menyetujui tindakan keras untuk memutuskan hubungan dengan Australia, ada pula pihak yang menginginkan hubungan kedua negara tidak diputuskan. Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M. Haripin menyatakan bahwa Indonesia dan Australia akan mengalami kerugian apabila terjadi pemutusan hubungan dan kerjasama secara menyeluruh. Menurutnya, kedua negara tidak siap menghadapi pemutusan hubungan, apabila terjadi, maka hal tersebut akan menjadi sejarah baru.<sup>6</sup>

Pemutusan hubungan secara menyeluruh kedua negara akan sama-sama dirugikan, karena masing-masing memiliki kepentingan dan saling ketergantungan. Indonesia misalnya, akan dirugikan dengan permasalahan terkait kerjasama pada berbagai sektor seperti ekspor dan impor, investasi, pendidikan, dan tenaga kerja. Sementara itu, Australia juga akan mengalami kerugian terutama terkait kebijakan pencari suaka (*asylum seeker*) atau manusia perahu yang melewati wilayah Indonesia. Australia juga menganggap Indonesia sebagai *strategic partner* dan negara yang sangat penting secara geopolitik dalam konteks kawasan Asia Pasifik. Selain itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia juga sudah banyak dalam membuat

konsep kerjasama terkait memasuki ASEAN Community 2015 mendatang. Jika Indonesia dan Australia sampai putus hubungan, maka akan turut mempengaruhi postur ASEAN. Menanggapi tindakan penyadapan oleh Australia tersebut, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Senin 18 November 2013 menegaskan penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Karena itu, lanjutnya, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut, dan memerintahkan kepada Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphah Kesoema untuk kembali ke tanah air. "Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang Duta Besar di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini. Pemanggilan duta besar untuk konsultasi merupakan langkah yang tidak bisa dianggap ringan, namun langkah yang minimum perlu kita lakukan untuk bisa mengkonsolidasi situasi dan menunjukkan sikap kita yang tegas dan terukur,"<sup>7</sup>Menlu Marty Natalegawa menyatakan pula bahwa: "Pemerintah Indonesia mendengar pernyataan-pernyataan dari kalangan tertentu Pemerintah Australia bahwa ini (penyadapan) adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh negara-negara. Jadi pernyataan yang dismissive, seolah-olah ini adalah sesuatu yang lazim dan lumrah dilakukan. Hal ini tidak ada nilai dan tidak ada artinya bagi Indonesia, dan kita menganggap pernyataan itu sangat meremehkan. " Pemerintah Indonesia menginginkan penjelasan resmi dari Pemerintah Australia mengenai alasan melakukan penyadapan tersebut.<sup>8</sup> Pemerintah

---

<sup>5</sup>Australia ciut bila Indonesia putuskan hubungan bilateral, <http://news.okezone.com>. diakses tanggal 14 Januari 2014

<sup>6</sup>Nasib hubungan diplomatik RI-Australia, <http://www.bbc.co.uk/Indonesia/forum/Australia>. diakses tanggal 14 Januari 2014

---

<sup>7</sup>Indonesia Panggil Dubes Australia soal dugaan mata-mata/<http://www.voaindonesia.com>. diakses tanggal 17 Januari 2014

<sup>8</sup>Presiden minta rakyat tenang sikapi penyadapan, <http://www.antaraneews.com>, diakses tgl 17 januari 2014

Indonesia meminta kepada rakyat tetap tenang karena pemerintah akan bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kebijakan yang harus pemerintah jalankan dalam menyikapi kasus tersebut. Dari permasalahan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan Oleh Australia.**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi tindakan penyadapan oleh Australia ?**

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menggambarkan kemitraan strategis hubungan diploma-tik Indonesia-Australia serta konflik yang selalu muncul dalam hubungan antara kedua negara.
- Untuk mengetahui dan menggambarkan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan respon publik Indonesia
- untuk menjelaska kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi penyadapan oleh Australia

### 2. Manfaat Penelitian

- Bagi peneliti adalah untuk pengembangan ilmu penge- tahuan yang telah dipelajari di jurusan ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Bagi institusi pendidikan adalah sebagai sumber referensi dalam penelitian berikutnya.

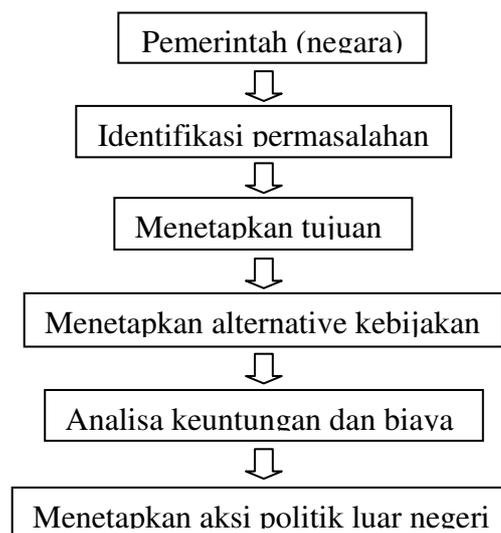
## D. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengambilan keputusan model aktor rasional menurut Graham T. Allison dan konsep politik luar negeri.

### Model Aktor Rasional

Aktor Rasional (Proses Intelektual) → Politik Luar Negeri

Secara sederhana Proses Intelektualnya sebagai berikut :



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang ada yaitu tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi tindakan penyadapan oleh Australia berdasarkan bukti-bukti tertulis dari berbagai sumber.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang penulis gunakan adalah (Library Research) penelitian kepustakaan, yakni teknik yang mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa buku-buku, jurnal,

majalah, surat kabar, bulletin, kliping, dokumen, dan sumber lainnya.

## F. Hasil Penelitian

### 1. Kemitraan Strategis Dan Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia

Pasang surut hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dengan berbagai konflik yang terjadi dari waktu ke waktu mulai dari Konfrontasi Indonesia-Malaysia, permasalahan Timur-Timur, pemberian izin tinggal sementara imigran Papua dan juga permasalahan terkait masalah terorisme yang membuat pemerintah Australia mengeluarkan travel warning terhadap Indonesia, serta permasalahan-permasalahan lainnya sehingga Indonesia dan Australia selalu berupaya untuk memperbaiki lalu mempererat hubungan diplomatik dengan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Bagi Australia, dalam buku putih pertahanannya tahun 1994 Australia menyebutkan bahwa untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di dasari oleh pertama, pentingnya Indonesia sebagai penyangga kekuatan di Asia Tenggara kedua, anggapan bahwa Indonesia adalah negara dari dan melalui mana serangan terhadap Australia dilakukan. Dikatakan pula bahwa Australia menganggap penting Indonesia yaitu karena faktor geostrategisnya, luas Indonesia dalam kawasan regional merupakan hal potensial yang mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Hal ini sesuai dengan kepentingan nasional Australia yaitu mewujudkan stabilitas di kawasan regional. Kemudian, jalur perdagangan luar negeri Australia harus melewati jalur laut kepulauan Indonesia.<sup>9</sup>

Australia menilai perkembangan politik dan ekonomi Indonesia yang diprediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada 2030.

<sup>9</sup>Heggy Kearens, skripsi, "Kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia: kebijakan kontra-terorisme pasca serangan Bom Bali I (2002-2008)" Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, 2012, hlm. 2-5

Pada 2050, Indonesia bahkan disebut-sebut bisa menjadi ekonomi nomor empat terbesar di dunia, di belakang China, Amerika, dan India.<sup>10</sup> Dalam Buku Putih Pertahanan (Defence White Paper) Australia 2013 sebagai konsekuensi dari berbagai prediksi strategis itu, pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott telah menjadikan hubungan dengan Indonesia sebagai prioritas kebijakan luar negeri utama.<sup>11</sup> Sedangkan Australia bagi Indonesia, dengan membangun kemitraan dengan Australia mendorong Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah dalam negerinya. Dalam dokumen Australian Agency for International Development (AusAID) dikatakan bahwa hubungan bilateral dengan Australia telah membantu Indonesia dalam berbagai bidang, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur dan tata kelola perekonomian yang lebih baik
2. Meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan
3. Menurunkan tingkat kemiskinan
4. Mendukung demokrasi, keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Membantu masalah lingkungan hidup (termasuk bencana alam)
6. Memberikan kapasitas yang lebih baik dalam memastikan keselamatan dan keamanan transportasi
7. Membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara.

Pada masa pemerintahan SBY di Indonesia dan Kevin Rudd di Australia kedua negara berupaya mempererat hubungan diplomatik dengan meningkatkan

<sup>10</sup>Paradoks Indonesia Ditengah Kebangkitan Ekonomi Asia Abad 21, [http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php?lang=id&id=12064&type=102#.U0T\\_Fchu41U](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=12064&type=102#.U0T_Fchu41U), diakses pada tanggal 20 Maret 2014

<sup>11</sup> Satrio Arismunandar, Ketika Garuda Lebih Kuat dari Kanguru (Hubungan Indonesia Australia), [http://www.academia.edu/5860372/Ketika\\_Garuda\\_Lebih\\_Kuat\\_dari\\_Kanguru\\_Hubungan\\_Indonesia\\_-\\_Australia\\_](http://www.academia.edu/5860372/Ketika_Garuda_Lebih_Kuat_dari_Kanguru_Hubungan_Indonesia_-_Australia_), diakses pada tanggal 20 Maret 2014

kerjasama di berbagai bidang begitu juga pada masa Abbot di Australia, Indonesia menjadi negara pertama dalam kunjungan luar negerinya agar terjalin hubungan diplomatik yang kuat. Hal ini terlihat dari hasil-hasil pertemuan antar kepala negara, *Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF)* , *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD)* Dari semua upaya-upaya tersebut telah merumuskan dan menyepakati sejumlah kerjasama dan memperkokoh kerjasama yang telah berlangsung. Perdagangan dua arah senilai 10,3 miliar dollar AS selama 2007-2008, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-4 Australia di ASEAN dan mitra dagang terbesar ke 13 dari seluruh mitra dagang Australia. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2009, Australia telah memastikan komitmen bantuan bagi Indonesia senilai 40 Juta dollar Australia lewat *International Forest Carbon Initiative* atau Prakarsa Karbon Hutan Internasional. Bantuan tersebut merupakan bagian dari bantuan senilai 200 juta dollar AS dan mencakup kemitraan hutan dan iklim Kalimantan yang ditujukan guna memangkas emisi gas rumah kaca.<sup>12</sup> Namun, upaya-upaya mempererat hubungan diplomatik tersebut ternodai dengan tindakan penyadapan oleh Australia yang membuat hubungan kedua negara mengalami penurunan semenjak tahun 2006.

## **2. Penyadapan Intelijen Australia Dan Respon Publik Indonesia**

Australia sudah lama melakukan aksi mata-mata terhadap Indonesia. Duta Besar Australia di Indonesia Sir Walter Crocker (1955-1956) dalam biografinya mengakui, lembaga sandi Australia, Defense Signal

<sup>12</sup>Manggabarani, Sartika. Skripsi, Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia-Australia, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanudin, 2012, hlm 80

Directorate (Australian Signal Directorate) secara rutin memecahkan dan membaca sandi diplomatik Indonesia sejak pertengahan 1950.<sup>13</sup>

Pada tahun 1960-an Badan intelijen sinyal Inggris, *Government Communications Headquarters (GCHQ)*, membantu Defence Signal Directorate (DSD) Australia yang sekarang berganti nama Australian Defence Directorate (ASD) memecahkan kunci alat sandi produksi Swedia, Hagelin, yang digunakan Kedutaan Besar Indonesia di Darwin Avenue, Canberra. Pos pemantauan lain *Defence Signal Directorate* mengoperasikan intersepsi sinyal dan markas pemantauan di Kepulauan Cocos, di Samudra Hindia, 1.100 kilometer barat daya Pulau Jawa. Fasilitasnya meliputi radio pengawasan, pelacak arah, dan stasiun satelit bumi. Dari pos pemantauan tersebut Agen mata-mata elektronik Australia Defence Signals Directorat (DSD) 'menguping' komunikasi Angkatan Laut dan militer Indonesia. Mantan pejabat intelijen pertahanan Australia mengatakan, pemantauan Australia terhadap komunikasi angkatan laut dan militer Indonesia dilakukan sampai memungkinkan melakukan penilaian terhadap keseriusan Indonesia untuk mencegah penyelundupan manusia.<sup>14</sup>

Pada tahun 1999, laporan rahasia DSD mengenai Indonesia dan Timor Timur bocor. Laporan itu menunjukkan intelijen Australia masih mempunyai akses luas terhadap komunikasi militer Indonesia, bahkan rakyat sipil di negeri ini. Oleh sebab itu pembakaran ibu kota Timor Timur, Dili, oleh tentara Indonesia pada September 1999 tidak lagi mengejutkan intelijen Australia. Kemudian pergerakan Spionase terhadap Indonesia tidak hanya sampai disitu, berdasarkan informasi yang di bongkar oleh

<sup>13</sup>Siapa Saja yang Disadap Australia Sejak 1950?, <http://www.tempo.co>, diakses tanggal 30 Maret 2014

<sup>14</sup>Australia Sadap Indonesia dari Kepulauan Cocos yang Terpencil, <http://news.liputan6.com/read/735879/australia-sadap-indonesia-dari-kepulauan-cocos-yang-terpencil>, diakses tanggal 30 Maret 2014

Edward Snowden menunjukkan bahwa Australia dalam aksi spionasinya menyadap presiden, ibi negar dan sejumlah pejabat Indonesia. Penyadapan tersebut terungkap bahwa pada tahun 2007, Intelijen Australia melakukan pengumpulan informasi nomor kontak pejabat Indonesia saat Konferensi Perubahan Iklim di Bali. Operasi ini dilakukan dari sebuah stasiun di Pine Gap, yang dijalankan dinas intelijen Amerika, CIA, dan Departemen Pertahanan Australia. Kemudian dinas badan intelijen Australia DSD, sekarang ASD mengoperasikan program bersandi Stateroom, memanfaatkan fasilitas diplomatik Australia di berbagai negara, termasuk di Jakarta. “Buka rahasia mereka, lindungi rahasia kita (*reveal their secrets, protect our own*)”. Itulah semboyan salah satu dinas badan Intelijen Australia tersebut. Operasi pengintaian ini terungkap menurut dokumen Edward Snowden, dengan nama sandi Reprieve yang merupakan bagian dari program intelijen ‘Lima Mata’. Kolaborasi intelijen ‘Lima Mata’ mencakup Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Australia.<sup>15</sup>

Dokumen rahasia yang dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald bahwa penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia berdasarkan bukti slides rahasia Departemen pertahanan Australia. Dalam Slides 6 halaman tersebut yang di sadap Australia yaitu :

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
2. Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono
3. Wakil Presiden Boediono
4. Mantan Wapres Jusuf Kalla
5. Mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat,
6. Mantan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng

7. Mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian
8. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia
9. Mantan Menteri Koor. Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan
10. Mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Kesepuluh nama orang penting di Indonesia tersebut terpampang berurutan dalam slide berjudul ‘IA Leadership Targets + Handsets.’ Di samping nama-nama mereka, tercantum pula jenis ponsel yang mereka gunakan. Presiden SBY, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sofyan Djalil pada tahun 2009 sama-sama memakai ponsel Nokia E90-1, Boediono dan Dino Patti Djalal menggunakan BlackBerry Bold 9000, Jusuf Kalla menggunakan Samsung SGH-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71-1, dan Widodo AS menggunakan Nokia E66-1. Satu hal jelas, seluruh ponsel itu memiliki teknologi 3G.

Pada slide lain yang diberi judul ‘Indonesia President Voice Events,’ terpampang grafik panggilan yang masuk dan keluar dari ponsel Nokia E90-1 milik Presiden SBY. Percakapan SBY tersebut disadap DSD sebanyak 15 kali pada bulan Agustus 2009. Rekaman data ini mencatat spesifik jumlah panggilan masuk dan panggilan keluar, lama panggilan dan nomor tujuan yang ditelepon. Pada setiap slide terdapat tanda “Top Secret Comint”. Comint adalah singkatan dari Communication Intelligence. Yang dalam bahasa Indonesia berarti, komunikasi intelijen yang sangat rahasia. .

### **3. Publik Indonesia Yang Pro Terhadap Pemutusan Hubungan Diplomatik Dengan Australia**

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto menilai Australia memiliki kepentingan besar menjalin hubungan baik dengan Indonesia, Australia yang lebih banyak bergantung pada Indonesia, di antaranya pada aspek keamanan teritorial negara

<sup>15</sup>Dokumen yang memanasakan Jakarta, tempo, edisi 1 Desember 2013,hal.118-121

kanguru itu. Menurutnya, ancaman terhadap Australia justru berpotensi dari Utara, misalnya ada negara lain yang mau menyerang Australia pasti melewati Indonesia.<sup>16</sup> Anggota Komisi III DPR-RI Eva Kusuma Sundari menambahkan, Pertama soal terorisme, Australia sangat butuh informasi tentang terorisme dari Indonesia. Kedua, dari segi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tergantung dari Australia, namun investor terbesar Indonesia sampai saat ini adalah Jepang, Amerika Serikat, dan China. Anggota komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, Australia boleh menanggapi penyadapan itu biasa. Tetapi kita tidak biasa. Apalagi penyadapan terhadap negara sahabat, pemberian sanksi atas sikap Australia itu harus dilakukan karena menyangkut kedaulatan negara. Sanksi tindakan terkeras adalah pemutusan hubungan diplomatik.<sup>17</sup>

#### **4. Publik Indonesia yang kontra terhadap pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia**

Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M. Haripin menyatakan bahwa Pemutusan hubungan secara menyeluruh Indonesia akan dirugikan dengan permasalahan terkait kerjasama pada berbagai sektor seperti ekspor dan impor, investasi, pendidikan, dan tenaga kerja. atapun agribisnis. Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, mengatakan memutuskan hubungan diplomatik adalah tindakan yang agak ekstrim. "Kita tak hanya bicara soal realisme politik atau idealisme tapi juga mencari pragmatisme dalam hubungan, hal-hal apa yang jadi kebaikan dalam jangka panjang, bersikap

---

<sup>16</sup>Australia yang lebih banyak bergantung pada Indonesia, <http://www.antaranews.com/berita/406557/australia-yang-lebih-banyak-bergantung-pada-indonesia>, diakses tanggal 30 Maret 2014

<sup>17</sup>Selangkah Lagi, Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Australia, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/259230>, diakses tanggal 30 Maret 2014

pragmatisme, adalah mengukur diri sendiri, apa yang dimiliki, dan kekurangan apa yang perlu ditingkatkan dalam kerja sama."<sup>18</sup> Begitu juga Menkumham Amir Syamsuddin ia mengatakan pesan serius kepada Australia harus disertai pandangan realistik yang tetap memperhatikan kepentingan kedua negara. Mengutamakan kepentingan bersama ini adalah pendekatan lebih produktif, dari pada beradu kuat dengan menegaskan bahwa negara yang satu lebih bergantung pada negara lain. Menurutnya, dengan peristiwa ini, yang diperlukan adalah perumusan kepentingan bersama yang lebih matang antar kedua negara.<sup>19</sup> Selain itu, dalam soal pendidikan, ada banyak orang Indonesia yang bersekolah di Australia, dan tidak jarang melalui jalur beasiswa yang dibiayai secara penuh oleh pemerintah Australia. BPS, misalnya, selama ini mendapat asistensi dan bimbingan dari Australian Bureau of Statistics (ABS) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas data.

#### **3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Tindakan Penyadapan Oleh Australia**

Menyikapi tindakan penyadapan tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan beberapa kebijakan terhadap Australia yaitu :

##### **1. Indonesia Meminta Penjelasan Resmi Dari Pemerintah Australia**

Dalam keterangan pers di kantor presiden SBY menyatakan Indonesia meminta jawaban dan penjelasan resmi dari pemerintah Australia. *Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia ini ke depan, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Dan berkaitan dengan itu, insya Allah, malam ini juga, saya akan mengirim surat*

---

<sup>18</sup>Pemutusan Hubungan Diplomatik Agak Ekstrim, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/09/pemutusan-hubungan-diplomatik-agak-ekstrim>, diakses tanggal 30 Maret 2014

<sup>19</sup>Kepentingan Bersama Indonesia dan Australia, <http://m.news.viva.co.id/news/read/461207-kepentingan-bersama-indonesia-dan-australia>, diakses tanggal 30 Maret 2014

kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Surat resmi saya, yang sudah kita persiapkan untuk sekali lagi, memintakan penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan itu.<sup>20</sup>

## **2. Penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia**

Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa Indonesia menegaskan penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. "Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang duta besar Indonesia di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini.<sup>21</sup> Pemerintah Indonesia tidak hanya memanggil Duta Besar Najib Riphath koesuma pulang ke tanah air pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan selanjutnya yang lebih nyata.

## **3. Pemerintah Indonesia mereview dan menghentikan sejumlah kerjasama**

Dalam pidato kepresidenannya, Presiden SBY menginstruksikan untuk sementara pemerintah Indonesia menghentikan beberapa kerjasama yaitu :

1. Menghentikan sementara kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen antara kedua negara.
2. Menghentikan latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun latihan yang sifatnya gabungan.
3. Menghentikan coordinated military operation patrollly, Yaitu kerjasama dalam menghadapi permasalahan

---

<sup>20</sup> Tunggu Jawaban Resmi, Indonesia Hentikan Kerjasama Intelijen dan Militer dengan Australia, <http://www.setkab.go.id/berita-11141-tunggu-jawaban-resmi-indonesia-hentikan-kerjasama-intelijen-dan-militer-dengan-australia.html>, diakses tanggal 17 Januari 2014

<sup>21</sup>Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia, <http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 17 Januari 2014

bersama, *people smuggling*, yang merepotkan Indonesia dan Australia di wilayah lautan.

Menanggapi instruksi presiden tersebut, Panglima TNI Jendral Moeldoko langsung menghentikan latihan gabungan angkatan udara antara Indonesia-Australia yaitu latihan gabungan Elang Ausindo dengan menarik personel dan enam pesawat F-16 dalam latihan gabungan tersebut. TNI juga menghentikan (Pelatihan Komodo), latihan gabungan (latgab) militer AD, AU dan AL Australia dengan Kopassus di Lembang, Jawa Barat. Latihan di Lembang ini adalah balasan dari latihan Kopassus di Sydney, saat Moeldoko menjadi KSAD.<sup>22</sup>

## **4. Indonesia Meminta Protokol Code Of Conduct Menyangkut Kerjasama Dengan Australia Di Berbagai Bidang.**

Indonesia berpendapat dan akan meminta, untuk keberlanjutan kerja sama di masa depan, Indonesia menginginkan adanya semacam protokol, code of conduct. Presiden mengatakan, protokol itu, (code of conduct) tersebut nantinya bersifat mengikat, jelas, dan kemudian dijalankan. Keperluan protokol tersebut untuk membangun kembali kepercayaan Indonesia terhadap Australia.

Keseriusan pemerintah Indonesia menyikapi tindakan penyadapan tersebut akhirnya Perdana Menteri Australia Tony Abbott menanggapi surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat 3 substansi dalam surat Perdana Menteri Tony Abbott dalam menjawab tentang penyadapan yang dilakukan Australia:

1. Pemerintah Australia menyatakan ingin terus menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.
2. komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu pada masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia.

---

<sup>22</sup>TNI Tarik Latihan F-16 dari Australia, <http://jakartagreater.com>, diakses tanggal 30 Maret 2014

3. PM Australia setuju dan mendukung usulan untuk menata kembali kerjasama bilateral, termasuk pertukaran intelijen namun dengan protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.<sup>23</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, adanya tanggapan dari pemerintah Australia dengan memberikan penjelasan bahwa Australia masih menginginkan kelanjutan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

### **5. Enam Langkah Roadmap Pemerintah Indonesia Terhadap Australia**

Dalam keterangan pers presiden pada tanggal 26 November 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 6 (enam) langkah roadmap yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk memulihkan kembali hubungan dengan Australia pasca penyadapan. *Roadmap* pemerintah Indonesia tersebut adalah:<sup>24</sup>

1. Menugasi Menteri luar negeri atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam isu-isu yang sensitif yang berkaitan dengan hubungan Indonesia-Australia pasca penyadapan
2. Setelah terjadi *understanding*, dan muncul *agreement* dari kedua belah pihak, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam;
3. Presiden SBY akan memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu;
4. setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, pengesahannya dapat dilakukan dihadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh Presiden SBY maupun PM Australia Tony Abbot;
5. tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode

etik itu sungguh dipenuhi dan dijalankan; dan

6. setelah kedua negara, utamanya Indonesia memiliki kembali kepercayaan atau trust dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan maka kerjasama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua Negara.

### **6. Indonesia Mendukung Resolusi Anti Spionase Dalam Sidang Umum PBB Yang Diajukan Jerman Dan Brazil**

Kasus penyadapan juga dialami oleh Jerman dan Brazil dan Prancis yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada awalnya, Jerman tidak memberikan kritik terbuka karena tidak ingin hubungan kedua negara terganggu. Namun, setelah mengetahui laporan tentang penyadapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel, pemerintah Jerman akhirnya melakukan kritik tajam dan protes diplomatik yang cukup keras dengan cara memanggil Duta Besar AS John B. Emerson di Berlin untuk memberikan keterangan. Sama halnya dengan Pemerintah Jerman, pemerintah Prancis pun memanggil Duta Besar AS Charles Rivkin di Paris terkait aksi penyadapan yang dilakukan oleh AS. Presiden Prancis Francois Hollande menuntut agar aksi penyadapan dihentikan.

Pemerintah Jerman dan Brasil pun membawa isu penyadapan ini ke tingkat pemimpin dunia. Pemerintah Jerman dan Brasil membawa isu penyadapan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung pembatasan spionase. Bahkan kedua negara mengusulkan pembuatan draf resolusi Majelis Umum PBB untuk pengawasan khusus yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengintaian komunikasi negara. Resolusi ini diperlukan agar terdapat garis batas yang jelas antara isu keamanan yang sah dan hak privasi individu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia, <http://www.jurnalparlemen.com>. Diakses 26 Maret 2014

<sup>24</sup>Keterangan Pers Keberlanjutan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral dengan Australia, <http://www.presidentri.go.id>, diakses tanggal 6 April 2014

---

<sup>25</sup>Sikap Indonesia Terhadap isu Penyadapan Amerika Serikat Dan Australia, <http://berkas.dpr.go.id>, diakses tanggal 5 April 2014

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Indonesia turut mendukung resolusi anti-spionase yang diajukan oleh pemerintah Jerman dan Brazil di Sidang Umum PBB. Bentuk dukungan Indonesia itu disampaikan dengan menjadi Co-sponsor bagi rancangan resolusi yang meminta penghentian spionase internet dan pelanggaran privasi. Marty berharap resolusi itu bisa memastikan pemerintah manapun tak lagi melakukan aksi spionase terhadap Indonesia dan negara lainnya. Resolusi Majelis Umum PBB ini tidak mengikat, tidak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara. Namun resolusi ini bisa mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB sehingga membawa bobot moral dan politik.<sup>26</sup> Sebanyak 55 negara telah menjadi Co-sponsor terhadap resolusi ini. Dalam resolusi itu menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara semena-mena dan tak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran berat terhadap hak privasi. Hal serupa juga berlaku untuk aksi penyadapan, karena hal itu turut melanggar kebebasan berekspresi.<sup>27</sup>

#### D. Kesimpulan

Indonesia adalah negara terpenting bagi Australia begitupun juga sebaliknya. Hubungan kedua negara mengalami pasang surut dalam sejarah hubungan diplomatiknya yang dipenuhi tarik ulur konflik. Tindakan penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia kembali membawa hubungan kedua negara mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia menarik Duta Besarnya untuk Australia Penarikan Duta Besar adalah langkah awal pemerintah Indonesia untuk memulai langkah selanjutnya, yaitu dengan tiga poin kebijakan dalam menyikapi kebijakan. Pertama, pemerintah Indonesia meminta jawaban dan

penjelasan resmi dari pemerintah Australia terkait alasan melakukan penyadapan. Kedua, pemerintah Indonesia menghentikan sejumlah kerjasama yairu menghentikan sementara kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen antara kedua negara, menghentikan sementara latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun latihan yang sifatnya gabungan, menghentikan sementara *coordinated military operation patrollly*, di wilayah lautan pada akhirnya, Australia meminta maaf kepada Indonesia dan ingin melanjutkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin lama dengan menerima permintaan Indonesia menata kembali hubungan bilateral dengan code of conduct. Untuk pemulihan hubungan dengan Australia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan enam langkah *roadmap*. Pemerintah Indonesia menyatakan, sebelum enam langkah *roadmap* tersebut terealisasi, sejumlah kerjasama tetap dihentikan. Di lain hal, Indonesia menjadi Co-Sponsor mendukung Jerman dan Brazil yang juga korban dari penyadapan, dalam resolusi anti spionase pada sidang umum PBB. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia memang menjadikan kedua negara mengalami ketegangan, begitu juga konflik kedua negara sebelumnya, namun penulis melihat ketegangan tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan diplomatik. Kedua negara selalu menghasilkan solusi menghadapi permasalahan yang terjadi. Pada analisis kebijakan luar negeri, pemerintah Indonesia dalam merespon tindakan penyadapan oleh Australia bertindak memecahkan masalah sebagai aktor rasional dengan proses intelektual dalam menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional.

#### E. Daftar Pustaka

##### BUKU :

Chauvel, Richard. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan*

<sup>26</sup>Indonesia Dukung Resolusi Anti-Spionase dalam Sidang Umum PBB, <http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 5 April 2014

<sup>27</sup>Selangkah Lagi, Resolusi Anti Spionase Disahkan PBB, <http://dunia.news.viva.co.id>, diakses tanggal 5 April 2014

- dalam Hubungan Politik Bilateral*, Jakarta: Granit, 2005
- Critchley, Susan. *Hubungan Australia dengan Indonesia dan Strategi Keamanan* Terjemahan Sugiarta Sriwibawa, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995
- Hamid, zulkifli. *Sistem Politik Australia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999
- Holsti, K.J. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*, Edisi Kedua, Bandung: Binacipta, 1992
- Manning, Chris. *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2000
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yanyan Mohammad *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. dalam Drs. Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional*, Jakarta : Putra A Bardin, 1999
- Rosenau, James N. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969.
- JURNAL DAN KARYA ILMIAH**
- Fanthoni, Hakim, M, Tesis, "Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia: Upaya Untuk Mencegah Gerakan Separatisme Di Indonesia Timur", Ilmu jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, 2010
- Haryani, Silvia. "Kerjasama kontra terorisme Indonesia Australia: perbandingan antara masa pemerintahan Megawati dan SBY", jurnal masyarakat kebudayaan dan politik, volume 21, Nomor 4: 352-360, Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Airlangga, 2010
- Kearens, Heggy. Skripsi, "Kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia: kebijakan kontra-terorisme pasca serangan Bom Bali I (2002-2008)" Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, 2012
- Sartika, Manggabarani. Skripsi, "Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia-Australia", Ilmu Hubungan Internasional FISIP, Universitas Hasanudin, 2012
- SURAT KABAR :**
- Dokumen yang memanasakan Jakarta, Tempo, edisi 1 Desember 2013
- KSAD, 60 ribu Intelijen Asing di Indonesia, Tempo, edisi 5 Desember 2003
- INTERNET :**
- Abbott, Soal Penyadapan: Tak Perlu Reaksi Berlebih, <http://www.tempo.co>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- Australia yang lebih banyak bergantung pada Indonesia, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- Kemitraan Indonesia-Australia: strategi kerjasama pembangunan Australia-Indonesia, <http://aid.dfat.gov.au>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014
- Kepentingan Bersama Indonesia dan Australia, <http://m.news.viva.co.id>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- Keterangan pers presiden RI terkait surat jawaban dari PM Australia, kantor presiden, Jakarta, 26 November 2013, <http://www.setkab.go.id>, diakses tanggal 6 April 2014

- Nasib hubungan diplomatik RI-Australia, <http://www.bbc.co.uk>, diakses tanggal 14 Januari 2014
- Paradoks Indonesia Ditengah Kebangkitan Ekonomi Asia Abad 21, <http://www.theglobalreview.com>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014
- Pemutusan Hubungan Diplomatik Agak Ekstrim, <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- Presiden minta rakyat tenang sikapi penyadapan, <http://www.antaraneews.com>, diakses tgl 17 januari 2014
- Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia, <http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 17 Januari 2014
- Satrio Arismunandar, Ketika Garuda Lebih Kuat dari Kanguru (Hubungan IndonesiaAustralia), <http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014
- Selangkah Lagi, Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Australia, <http://www.pikiranrakyat.com>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- Siapa Saja yang Disadap Australia Sejak 1950?, <http://www.tempo.co>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- TNI Tarik Latihan F-16 dari Australia, <http://jakartagreater.com>, diakses tanggal 30 Maret 2014
- Tunggu Jawaban Resmi, Indonesia Hentikan Kerjasama Intelijen dan Militer dengan Australia, <http://www.setkab.go.id>, diakses tanggal 17 Januari 2014